

PENGUATAN SISTEM EKONOMI BAGI MASYARAKAT DI DESA WAKAL

Teddy Leasiwal¹, Andre Sapthu², Desry Louhenapessy³, Umami Duwila⁴, Lisye Liur⁵,
Korneles Sangur⁶, Amin Ramly⁷, Ali Tutupoho⁸, Maria K Tupamahu⁹, Fibriano Sapteno¹⁰,
Jani¹¹

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11) Jurusan Ekonomi Pembangunan, Universitas Pattimura
email: andresapthu@yahoo.com

Abstrak

Pemberdayaan Perempuan Kesejahteraan Keluarga (PKK), petani, dan nelayan menjadi krusial dalam mengokohkan sistem ekonomi masyarakat desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi pemberdayaan yang efektif guna meningkatkan peran PKK, petani, dan nelayan dalam memperkuat perekonomian desa. Metode penelitian yang digunakan melibatkan survei, wawancara, dan analisis data untuk menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui pelibatan PKK, petani, nelayan dalam berbagai kegiatan ekonomi, seperti pelatihan keterampilan, pengelolaan usaha mikro, dan promosi produk lokal, dapat meningkatkan kemandirian perempuan dan kesejahteraan keluarga. Sementara itu, pemberdayaan petani dilakukan melalui penyediaan akses terhadap teknologi pertanian modern, pendidikan pertanian, dan penguatan jaringan kerjasama antarpetani. Bagi nelayan, upaya pemberdayaan difokuskan pada peningkatan keterampilan penangkapan ikan, pemasaran hasil perikanan, dan diversifikasi mata pencaharian. Dengan demikian, ketiga kelompok ini dapat berperan aktif dalam memperkuat ekonomi desa melalui peningkatan produksi, efisiensi pengelolaan sumber daya, dan pemasaran produk lokal. Kesimpulannya, pemberdayaan PKK, petani, dan nelayan merupakan strategi integral dalam meningkatkan sistem ekonomi masyarakat desa. Dengan melibatkan perempuan, petani, dan nelayan dalam berbagai aspek ekonomi, diharapkan dapat menciptakan desa yang mandiri, berkelanjutan, dan mampu menghadapi tantangan global. Langkah-langkah konkret dan dukungan pemerintah serta pihak terkait diperlukan untuk memastikan keberlanjutan upaya pemberdayaan ini.

Kata Kunci: Potensi Hutan, Laut Dan Pemberdayaan

Abstract

Empowering Women's Family Welfare (PKK), farmers and fishermen is crucial in strengthening the economic system of village communities. This research aims to identify effective empowerment strategies to increase the role of PKK, farmers and fishermen in strengthening the village economy. The research methods used involve surveys, interviews and data analysis to describe the economic conditions of village communities. The research results show that through involving the PKK in various economic activities, such as skills training, managing micro businesses, and promoting local products, women's independence and family welfare can be increased. Meanwhile, farmer empowerment is carried out through providing access to modern agricultural technology, agricultural education, and strengthening cooperation networks between farmers. For fishermen, empowerment efforts are focused on improving fishing skills, marketing fishery products, and diversifying livelihoods. Thus, these three groups can play an active role in strengthening the village economy through increasing production, efficient resource management, and marketing local products. In conclusion, empowering PKK, farmers and fishermen is an integral strategy in improving the economic system of village communities. By involving women, farmers and fishermen in various economic aspects, it is hoped that we can create villages that are independent, sustainable and able to face global challenges. Concrete steps and support from the government and related parties are needed to ensure the sustainability of this empowerment effort.

Keywords: Forest, Ocean And Empowerment Potential

PENDAHULUAN

Penguatan sistem ekonomi yang mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan" merupakan topik yang relevan dan penting dalam konteks pembangunan ekonomi suatu negara atau wilayah. Pendahuluan dalam penulisan tentang topik ini seharusnya memberikan gambaran umum tentang latar belakang dan relevansi.

"Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan adalah salah satu tujuan utama dalam pembangunan suatu negara atau wilayah, Soubbotina (2004). Peningkatan pendapatan, kesejahteraan masyarakat, dan stabilitas ekonomi merupakan aspek penting yang menjadi fokus dalam upaya mencapai tujuan ini. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, perlu adanya penguatan sistem ekonomi yang mendukung perkembangan yang seimbang, yang tidak hanya menguntungkan sebagian kecil masyarakat, tetapi juga memberikan manfaat kepada seluruh lapisan masyarakat, Ghisellini et al., (2016).

Penguatan sistem ekonomi mengacu pada berbagai kebijakan, praktik, dan tindakan yang diterapkan oleh pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku ekonomi lainnya. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif, di mana pertumbuhan ekonomi dapat terjadi secara berkesinambungan. Upaya ini melibatkan sejumlah langkah, seperti perencanaan pembangunan yang bijaksana, investasi dalam pendidikan dan pelatihan, pengembangan infrastruktur, dan kebijakan perpajakan yang cerdas.

Selain itu, penguatan sistem ekonomi yang berkelanjutan juga memperhatikan aspek-aspek lingkungan, Lehtonen (2004). Upaya ini mendorong integrasi pertimbangan lingkungan dalam pembangunan ekonomi, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak merusak sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Dalam tulisan ini, kita akan menggali lebih dalam tentang strategi dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk menguatkan sistem ekonomi masyarakat desa dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, kita akan menyoroti peran penting dari pemberdayaan masyarakat, kebijakan inklusif, dan kerja sama yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan terbagun kemandirian ekonomi bagi masyarakat desa. Dengan pemahaman yang mendalam tentang konsep ini, kita dapat mengidentifikasi solusi yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan melalui penguatan sistem ekonomi masyarakat desa.

Masalah yang sering timbul dalam masyarakat yang memerlukan penguatan terhadap sistem ekonomi desa atau masyarakat dapat beragam dan bervariasi tergantung pada konteksnya, Storper (2005). Namun, beberapa masalah umum yang sering dihadapi oleh masyarakat dan mengapa penguatan sistem ekonomi desa perlu dilakukan karena:

1. Kemiskinan: Banyak desa atau masyarakat mengalami tingkat kemiskinan yang tinggi, yang dapat disebabkan oleh kurangnya peluang pekerjaan, rendahnya pendapatan, atau ketidaksetaraan ekonomi.
2. Pengangguran: Tingginya tingkat pengangguran, terutama di daerah pedesaan, dapat menjadi masalah serius. Banyak penduduk desa tidak memiliki akses mudah ke pekerjaan yang layak.
3. Ketidaksetaraan Ekonomi: Ketidaksetaraan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan seringkali menjadi masalah dalam masyarakat. Sebagian orang dapat menjadi sangat kaya, sementara yang lain tetap dalam kondisi kemiskinan.
4. Kurangnya Akses ke Sumber Daya: Masyarakat di daerah pedesaan mungkin memiliki keterbatasan akses ke sumber daya seperti tanah, air, atau fasilitas pendidikan dan kesehatan.
5. Ketergantungan pada Sektor Tertentu: Banyak desa atau masyarakat mungkin terlalu tergantung pada sektor ekonomi tunggal, seperti pertanian atau industri tertentu, yang dapat meningkatkan kerentanannya terhadap perubahan pasar.
6. Kurangnya Infrastruktur: Infrastruktur yang buruk atau kurang berkembang, seperti jalan, listrik, dan telekomunikasi, dapat menghambat pertumbuhan ekonomi lokal.
7. Rendahnya Kualifikasi dan Pendidikan: Rendahnya tingkat pendidikan dan kualifikasi tenaga kerja dapat membatasi peluang pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi.
8. Kebijakan yang Tidak Mendukung: Kadang-kadang, kebijakan pemerintah tidak selalu mendukung pengembangan ekonomi desa atau masyarakat dengan benar, dan ini dapat menjadi hambatan bagi pertumbuhan yang berkelanjutan.

Setelah permasalahan desa diidentifikasi, maka perlu dilakukan penyusunan program kegiatan yang akan dilakukan melalui aksi nyata berupa penggalan lebih lanjut atau lebih mendalam terhadap potensi desa sehingga sosialisasi yang dilakukan tepat sasaran serta dapat menghasilkan laporan yang sesuai dengan kondisi desa.

Kondisi desa yang memiliki luas area hutan yang luas memiliki potensi besar dalam meningkatkan ekonomi keluarga dan masyarakat desa. Hutan yang luas dapat dijadikan sumber daya yang berharga untuk berbagai keperluan ekonomi, seperti produksi kayu, hasil hutan non-kayu, serta potensi pariwisata alam. Pemanfaatan hutan ini dengan bijak dapat menjadi penggerak utama dalam peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Desa Wakal merupakan suatu desa yang memiliki luas area hutan yang besar sehingga memberikan peluang besar untuk dimanfaatkan untuk peningkatan ekonomi keluarga. Disamping pemanfaatan hasil hutan, penting untuk menjaga ekosistem hutan dan sumber daya alam secara berkelanjutan. Ini termasuk pengelolaan hutan yang berkelanjutan, perlindungan terhadap hutan dari kerusakan, serta penanaman kembali pohon. Masyarakat desa dapat diversifikasi sumber penghasilan mereka dengan memanfaatkan hutan untuk produksi kayu, hasil hutan non-kayu seperti buah-buahan hutan, madu, atau tanaman obat-obatan, serta layanan ekowisata.

Melibatkan masyarakat desa dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan. Ini bisa melibatkan program pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam pengelolaan sumber daya hutan. Membangun kemitraan dengan sektor swasta, pemerintah, atau LSM untuk mendukung investasi dan pengembangan usaha yang berkelanjutan dalam pemanfaatan hutan. Investasi ini dapat mencakup pengolahan kayu, produksi hasil hutan non-kayu, dan pengembangan infrastruktur pariwisata.

Memastikan bahwa pemanfaatan hutan tidak merusak lingkungan dan ekosistem alam. Konservasi dan perlindungan lingkungan harus menjadi bagian integral dari strategi pengembangan ekonomi berbasis hutan. Memastikan bahwa ada regulasi dan peraturan yang jelas untuk mengatur pemanfaatan hutan. Ini dapat mencakup hak kepemilikan lahan, izin pemanfaatan, dan pemantauan yang ketat. Dengan pendekatan yang berkelanjutan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan yang bijak, desa-desa dengan hutan yang luas dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat mereka sambil tetap menjaga keberlanjutan ekosistem hutan untuk generasi mendatang.

Masyarakat desa dapat mengelola hutan untuk produksi kayu yang berkelanjutan, menghasilkan kayu yang berkualitas untuk konstruksi, furnitur, atau bahan bakar kayu. Selain itu, mereka juga dapat mengumpulkan dan menjual produk non-kayu seperti buah hutan, madu, rotan, dan herba obat-obatan. Hutan yang terawat dengan baik dapat menjadi tujuan wisata alam yang menarik. Masyarakat desa dapat mengembangkan wisata hutan dengan menyediakan layanan seperti jalur hiking, petualangan alam, wisata burung, dan layanan akomodasi. Masyarakat desa dapat mengkombinasikan kegiatan peternakan dengan kehutanan, seperti pengembangan hutan rakyat atau agroforestri. Ini dapat mencakup pengembalaan ternak di hutan, pembesaran unggas di hutan, atau kawasan agroforestri yang mencakup tanaman pangan, perkebunan, dan pohon kayu.

Masyarakat desa dapat menawarkan layanan pengelolaan hutan berkelanjutan, seperti pemulihan lahan terdegradasi, penanaman kembali pohon, atau pengelolaan air hujan, Marques et al., (2016). Ini bisa melibatkan proyek-proyek berbasis kontrak dengan pihak luar yang membutuhkan layanan ini.

Masyarakat desa dapat mengembangkan kegiatan produksi dan pengolahan bambu serta rotan. Bambu dan rotan memiliki banyak aplikasi dalam konstruksi, kerajinan, dan produksi furniture. Masyarakat desa dapat menanam tanaman pangan di bawah kanopi hutan (pertanian hutan), seperti kopi, cokelat, atau kulit manis. Ini dapat memberikan pendapatan tambahan sambil juga menjaga keberlanjutan hutan, Mohammed (2017). Dalam beberapa kasus, masyarakat desa dapat menjadi mitra dalam program-program konservasi hutan yang dikelola oleh organisasi lingkungan atau lembaga pemerintah. Mereka dapat menerima kompensasi atau insentif ekonomi sebagai bagian dari upaya konservasi ini.

METODE

Penelitian ini dilakukan di desa Wakal kecamatan leihitu, kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Mitra sasaran dalam penelitian ini adalah kelompok PKK serta kelompok tani yang ada di desa wakal. Metode yang digunakan adalah Metode Participatory Rural Appraisal (PRA) merupakan suatu pendekatan partisipatif dalam pengumpulan informasi dan pemahaman terhadap kehidupan masyarakat di daerah pedesaan, Chambers (1994), Hidayana et al., (2019). Metode ini dirancang untuk melibatkan secara aktif para anggota masyarakat dalam proses pengumpulan data dan analisis, sehingga mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Selain metode Participatory Rural Appraisal (PRA) dilakukan juga ceramah dalam penyampaian materi kepada masyarakat sebagai mitra sasaran dengan langkah – langkah sebagai berikut:

1. Identifikasi Kebutuhan dan Kondisi Awal (Metode PRA):
 - a. Tim pengabdian bekerja sama dengan masyarakat menggunakan teknik PRA untuk mengidentifikasi kebutuhan dan kondisi awal di wilayah tersebut.
 - b. Pemetaan partisipatif dan diskusi kelompok membantu dalam memahami perspektif masyarakat terkait isu-isu yang mereka hadapi.
2. Analisis Bersama (Metode PRA):

- c. Data yang dikumpulkan melalui metode PRA dievaluasi bersama-sama oleh anggota masyarakat dan tim pengabdian.
- d. Diskusi dilakukan untuk memahami lebih dalam permasalahan dan peluang yang mungkin dihadapi masyarakat.
3. Penyampaian Informasi (Metode Ceramah):
 - e. Setelah pemahaman bersama terbentuk, tim pengabdian dapat menggunakan metode ceramah untuk menyampaikan informasi spesifik, pengetahuan baru, atau praktik terbaik kepada masyarakat.
 - f. Ceramah dapat mencakup penjelasan teknis atau informasi penting yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat.
4. Diskusi dan Tanya Jawab (Kombinasi Kedua Metode):
 - g. Setelah sesi ceramah, dilakukan sesi diskusi terbuka dan tanya jawab untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berbagi pandangan, pertanyaan, atau pengalaman mereka.
 - h. Pendekatan ini memfasilitasi dialog dua arah, memungkinkan tim pengabdian untuk memahami respons masyarakat secara lebih mendalam.
5. Perencanaan Aksi Bersama (Metode PRA):
 - i. Setelah penyampaian informasi, dilibatkan kembali metode PRA untuk merencanakan aksi bersama antara tim pengabdian dan masyarakat.
 - j. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan akan meningkatkan peluang keberhasilan implementasi.
6. Evaluasi Bersama (Metode PRA):
 - k. Secara berkala, lakukan evaluasi bersama antara tim pengabdian dan masyarakat untuk menilai progres dan menyesuaikan rencana aksi jika diperlukan.

Secara rinci, kegiatan pengabdian kepada masyarakat di desa Wakal, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku tengah dengan mengidentifikasi keunggulan endowment yang dimiliki desa dari daerah daratan maupun lautan yang dapat dimanfaatkan bagi peningkatan ekonomi desa. Data dikumpulkan melalui metode (PRA) dievaluasi secara bersama untuk memahami bersama masalah dan peluang setelahnya disampaikan kepada masyarakat melalui ceramah, diskusi dan tanya jawab (diskusi dua arah). Setelah informasi diperoleh, dapat dikembangkan untuk merencanakan aksi bersama antara team dan masyarakat dan setelahnya perlu untuk melakukan evaluasi bersama untuk menilai progres penyesuaian aksi jika diperlukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Wakal adalah desa yang ada di kecamatan leihitu Kabupaten Maluku Tengah. Wakal yang berada di pesisir pantai sekarang merupakan gabungan dari tiga kelompok besar yang turun dari gunung masapal pada awal kedatangan belanda, walaupun salah satu marga yang telah datang kemudian dari negeri Tanjung Sial telah menempati negeri baru di pesisir pantai sebelum negeri di turunkan ke pantai Negeri Wakal yang bernama lula merupakan negeri Wakal yang sangat dekat dengan pesisir pantai. Negeri Wakal yang telah berada di pesisir pantai kini terbagi atas dua wik, yaitu wik jambu manis, wik delima dan wik ganemo. Namu semakin berkembangnya penduduk Wakal, maka terbentuk dua wik baru yang bernama wik walaputih dan wik paser putih. Daerah petuwanan Wakal (negeri-negeri binongko) terdirit atas wahatu, lula, waulu, oli, air cabang, air ali dan karanjang.

Desa Wakal yang memiliki potensi hutan yang masih terjaga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga baik itu lewat kelompok PKK maupun kelompok tani. Disamping hutan, desa Wakal yang berada di pesisir pantai memiliki potensi bahari yang baik untuk dikembangkan bagi peningkatan ekon0mi rumah tangga. Sosialisasi yang dilakukan oleh team dapat dilihat seperti pada gambar dibawah ini:



Gambar 1. Dokumentasi

Potensi hutan memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan ekonomi masyarakat, terutama melalui program pemberdayaan yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya hutan secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, ada beberapa aspek penting yang perlu ditekankan untuk memahami bagaimana potensi hutan dapat menjadi pendorong utama pengembangan ekonomi masyarakat.

Hutan menyediakan berbagai sumber daya alam yang beragam, seperti kayu, non-kayu, dan tumbuhan obat-obatan, Lund (1998). Pemanfaatan yang bijak dari sumber daya ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan masyarakat. Selanjutnya, pengembangan usaha kayu, termasuk penanaman kayu dan pengolahan produk kayu, dapat menjadi sumber penghasilan yang berkelanjutan. Produk non-kayu yang dihasilkan oleh hutan, seperti buah, rempah-rempah, getah, dan rotan, membuka peluang pengembangan usaha lokal. Program pemberdayaan masyarakat dapat memberikan dukungan melalui pelatihan dalam pengelolaan dan pemasaran produk-produk non-kayu tersebut. Hal ini dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk di pasar, Sánchez-Gutiérrez et al., (2019).

Selanjutnya, potensi hutan untuk ekowisata dan pariwisata alam juga dapat dijelajahi sebagai sumber pendapatan tambahan, Sven Wunder (1999). Melalui program pemberdayaan, masyarakat dapat dilibatkan dalam pelatihan untuk mengelola destinasi ekowisata, homestay, dan aktivitas pariwisata yang berkelanjutan. Kegiatan konservasi lingkungan hutan juga merupakan bagian integral dari potensi hutan dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Masyarakat dapat terlibat dalam upaya konservasi yang berkelanjutan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan nilai ekonomi dan daya tarik wilayah tersebut.

Pengembangan industri hutan berkelanjutan, termasuk hutan tanaman industri, dapat diintegrasikan ke dalam program pemberdayaan, Klooster (2010). Masyarakat dapat diberdayakan melalui pelatihan dalam manajemen kehutanan yang berkelanjutan, menciptakan peluang penghasilan jangka panjang. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui pendekatan partisipatif dapat menjadi langkah penting. Pembentukan kelompok pengelolaan hutan atau petani PKK dan koperasi masyarakat dapat menjadi wadah untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan, Syam et al., (2022).



Gambar 2. Dokumentasi

Penyuluhan dan edukasi mengenai keberlanjutan pemanfaatan sumber daya hutan menjadi aspek penting dalam program pemberdayaan. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih baik tentang cara mengoptimalkan potensi hutan secara berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur yang mendukung aksesibilitas ke wilayah hutan juga perlu diperhatikan. Infrastruktur yang baik dapat membuka peluang baru untuk pemanfaatan potensi hutan secara lebih efisien, Gerasimov et al., (2013). Pelibatan sektor swasta dan pihak-pihak eksternal lainnya dapat meningkatkan investasi dan kolaborasi yang mendukung program pemberdayaan masyarakat. Kemitraan ini dapat mencakup pendanaan, peningkatan teknologi, dan akses pasar yang lebih luas.

Terakhir, evaluasi berkala terhadap progres program pemberdayaan harus dilakukan secara terus-menerus. Evaluasi ini membantu menilai keberhasilan program dan melakukan penyesuaian jika diperlukan, sehingga program dapat terus berkontribusi positif terhadap pengembangan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan potensi hutan.

SIMPULAN

Kesimpulan mengenai model pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan di desa wakal bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan ekonomi secara menyeluruh di tingkat masyarakat. Model ini menekankan pentingnya memberikan akses, pelatihan, dan dukungan kepada masyarakat agar mereka dapat aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi masyarakat juga mencakup upaya untuk meningkatkan keterampilan, membuka akses terhadap sumber daya, dan menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan usaha lokal. Dengan demikian, model ini diarahkan untuk menciptakan dampak positif jangka panjang dengan memberikan masyarakat kontrol lebih besar atas kehidupan ekonomi mereka sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Chambers, R. (1994). Participatory Rural Appraisal (Pra): Analysis Of Experience. *World Development*, 22(9), 1253–1268. [https://doi.org/10.1016/0305-750x\(94\)90003-5](https://doi.org/10.1016/0305-750x(94)90003-5)
- Gerasimov, Y., Senko, S., & Karjalainen, T. (2013). Prospects Of Forest Road Infrastructure Development In Northwest Russia With Proven Nordic Solutions. *Scandinavian Journal Of Forest Research*, 28(8), 758–774.
- Ghisellini, P., Cialani, C., & Ulgiati, S. (2016). A Review On Circular Economy: The Expected Transition To A Balanced Interplay Of Environmental And Economic Systems. *Journal Of Cleaner Production*, 114, 11–32. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.09.007>
- Hidayana, B., Kutaneegara, P. M., Setiadi, S., Indiyanto, A., Fauzanafi, Z., Nugraheni, M. D. F., Sushartami, W., & Yusuf, M. (2019). Participatory Rural Appraisal (Pra) Untuk Pengembangan Desa Wisata Di Pedukuhan Pucung, Desa Wukirsari, Bantul. *Bakti Budaya*, 2(2), 3.
- Klooster, D. (2010). Standardizing Sustainable Development? The Forest Stewardship Council's Plantation Policy Review Process As Neoliberal Environmental Governance. *Geoforum*, 41(1), 117–129. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2009.02.006>
- Lehtonen, M. (2004). The Environmental-Social Interface Of Sustainable Development: Capabilities, Social Capital, Institutions. *Ecological Economics*, 49(2), 199–214. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2004.03.019>
- Lund, H. G. (1998). The Non-Wood Forest Resources Mystery. Lund, H. Gyde; Pajari, Brita; Korhonen, Minna. Eds, 32–44.
- Marques, M. J., Schwilch, G., Lauterburg, N., Crittenden, S., Tesfai, M., Stolte, J., Zdruli, P., Doko, A., Zucca, C., Petursdottir, T., Evelpidou, N., Karkani, A., Asliyilmazgil, Y., Panagopoulos, T., Yirdaw, E., Kanninen, M., Rubio, J. L., & Schmiedel, U. (2016). Multifaceted Impacts Of Sustainable Land Management In Drylands: A Review. *Sustainability (Switzerland)*, 8(2). <https://doi.org/10.3390/Su8020177>
- Mohammed, O. (2017). Working Paper 161. 161.
- Sánchez-Gutiérrez, J., Cabanelas, P., Lampón, J. F., & González-Alvarado, T. E. (2019). The Impact On Competitiveness Of Customer Value Creation Through Relationship Capabilities And Marketing Innovation. *Journal Of Business & Industrial Marketing*, 34(3), 618–627.
- Soubbotina, T. P. (2004). Beyond Economic Growth: An Introduction To Sustainable Development. World Bank Publications.
- Storper, M. (2005). Society, Community, And Economic Development. *Studies In Comparative International Development*, 39, 30–57.

- Sven Wunder. (1999). Promoting Forest Conservation Through Ecotourism Income? Promoting Forest Conservation Through Ecotourism Income?, 62(21). <https://doi.org/10.17528/Cifor/000538>
- Syam, R., Ras, A., Raf, N., Rahim, H., & Suparman, M. D. A. (2022). The Role Of Village Institutions In Participatory Development Planning. *International Journal Of Qualitative Research*, 1(3), 201–210. <https://doi.org/10.47540/Ijqr.V1i3.440>